

# ADAPTASI EKONOMI ETNIS TIONGHOA BOGOR 1905-1942

Huddy Husin<sup>1</sup>, Ahmad Kosasih<sup>2</sup>, M. Fendi Aditya<sup>3</sup>, Januar Barkah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Progam Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI

<sup>2</sup> Progam Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI

<sup>3</sup> Progam Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI

<sup>4</sup> Progam Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received Sep 10<sup>th</sup>, 2023

Revised Nov 17<sup>th</sup>, 2023

Accepted Januari 20<sup>th</sup>, 2024

### Keywords:

Economic;

Chinese;

Bogor;

## ABSTRACT

Adaptasi sosial menghasilkan interaksi simbolik yang termanifestasi dalam peraktek-peraktek di bidang lain seperti ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana adaptasi ekonomi etnis Tionghoa di kota Bogor dipandang mampu memberikan eksistensi mereka sejak masa kolonial sampai saat ini. Dengan metode dan pendekatan deskriptif sejarah dalam menguraikan keberadaan etnis Tionghoa di kota Bogor, hasil penelitian yang didapat kurang lebih menjawab bagaimana adaptasi dapat menjaga eksistensi etnis Tionghoa di kota Bogor sejak masa kolonial sampai saat ini. Eksistensi itu dapat dilihat pada keterlibatan ekonomi kota, baik yang berhubungan dengan sektor perdagangan, industri, perkebunan serta jasa-jasa pariwisata.

*Social adaptation produces symbolic interactions that are manifested in practices in other fields such as economics. This research aims to describe how the economic adaptation of ethnic Chinese in the city of Bogor is seen as being able to provide their existence from the colonial period until now. Using historical descriptive methods and approaches in describing the existence of ethnic Chinese in the city of Bogor, the research results obtained more or less answer how adaptation can maintain the existence of ethnic Chinese in the city of Bogor from the colonial period until now. This existence can be seen in the city's economic involvement, both related to the trade, industry, plantation and tourism services sectors.*



© 2023 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Corresponding Author:

Huddy Husin,

Email: [hudi0212@gmail.com](mailto:hudi0212@gmail.com)

**How to Cite:** Husin dkk. (2023). Adaptasi Ekonomi Etnis Tionghoa Bogor 1905-1942. *Alur Sejarah Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. 6 No.1. 1-9

## PENDAHULUAN

Sejak berkembangnya kegiatan ekonomi industri perkebunan di Afdeling Bogor di akhir abad ke-19, kegiatan ekonomi etnis Tionghoa di kota Bogor tidak hanya dalam kegiatan berdagang semata. Akan tetapi mulai merambah pada pengolahan perkebunan dan pemilikan toko kelontong serta perdagangan keliling. Dalam konteks ini perdagangan, bukan lagi menjadi aspek simbolik dalam kehidupan ekonomi mereka di kota Bogor. Berdirinya lahan-lahan perkebunan dan pertanian kecil di tanah-tanah pertikelir milik pengusaha etnis Tionghoa menjadi perluasan kegiatan ekonomi mereka di arena ruang publik kota Bogor. Kemampuan diplomasi dan keengganan untuk masuk ke dalam dimensi politik (menantang kekuasaan kolonial), menjadi modal sosial bagi etnis Tionghoa meraih kepercayaan pemerintah kolonial (De Faille, 1971: 15; Abdullah dkk, 1985: 2).

Kelompok etnis Tionghoa di kota Bogor juga membangun kekuatan ekonomi mereka dengan membuka keran pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, bagi ekonomi perkebunan di kota Bogor melalui pengiriman tenaga terampil perkebunan yang berasal dari Tiongkok (Verslag van den Economischen Toestand der Indlandsche Bevolkin Deel 2, 1924: 179). Kegiatan pengiriman tenaga kerja ini sejatinya telah berlangsung sejak akhir abad ke-19 akan tetapi terbagi ke dalam beberapa wilayah di Jawa, Sumatera (pantai timur), sampai dengan di wilayah Makassar (van der Zwaal, 1936: 123). Keberadaan tanah-tanah partikelir, keberadaan para buruh perkebunan, melengkapi keberadaan toko kelontong, kampung Pecinan dan Kelenteng sebagai simbolik dalam konteks sosial, ekonomi dan budaya etnis Tionghoa di kota Bogor.

Pasca dihapusnya pelembagaan Kapitan Cina pada awal tahun 1910-an oleh pemerintah kolonial, terjadi perubahan penting dalam konstelasi politik di Hindia-Belanda. Pengaktifan konsep Gemeente beserta kelengkapannya yakni Gemeenteraad membuat peluang etnis Tionghoa di kota Bogor untuk dapat mempertahankan eksistensinya terbuka lebar. Sebagai perwakilan dari Vreemdeoosterlingen (Timur Asing), etnis Tionghoa menjadi satu-satunya yang mewakili kelompok Timur Asing dalam lembaga dewan kota (Gemeenteraad). Situasi ini sangat menguntungkan bagi kelompok etnis Tionghoa di satu sisi, akan tetapi di sisi lain menambah jarak (distingsi) antara kelompok etnis Tionghoa dengan masyarakat bumiputera maupun kelompok masyarakat lainnya seperti Arab, Jawa, India, Jepang dan lainnya di kota Bogor (Gouvernementbesluit, 1925).

Kemampuan untuk mampu mengelola sumber daya dan potensi konflik antara mereka (etnis Tionghoa) dan kelompok masyarakat lainnya di kota Bogor menjadi satu hal yang pokok untuk menjaga keberlangsungan mereka di kota Bogor. Adaptasi memainkan peran yang cukup penting untuk menghadapi kontestasi dalam ruang kota Bogor, yang cukup kompleks dan rumit akibat pelaksanaan berbagai kebijakan penguasa kolonial. Lembaga pernikahan, lembaga adat (Kelenteng), kampung Pecinan, dan sekolah-sekolah swasta Tionghoa menjadi sangat strategis untuk dikelola agar dapat menjaga keberlangsungan mereka di masa depan.

Kelompok etnis Tionghoa di kota Bogor mampu bertahan selama masa penguasaan pemerintah kolonial, bahkan sampai periode penguasaan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Kampung Pecinan sebagai lokus sosial-budaya etnis Tionghoa di Bogor memainkan peranan penting, karena kedekatannya dengan Istana Presiden di Bogor (pusat kota) menjadi satu faktor penting tidak terciptanya huru-hara di kampung pecinan selama masa revolusi. Di sisi lain, keberadaan pelembagaan ekonomi milik etnis Tionghoa di kota

Bogor seperti pabrik pembuatan tepung dan penggilingan padi memainkan peranan penting dalam mensupport perjuangan Tentara Nasional Indonesia di kota Bogor pada masa perang kemerdekaan (Wawancara Bapak Guntur, 15 November 2023).

Jalinan sosial, kemampuan ekonomi dan pengelolaan modal budaya oleh etnis Tionghoa di kota Bogor sekilas sangat menarik untuk dipahami lebih mendalam. Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana adaptasi dapat menjaga eksistensi mereka (etnis Tionghoa) di kota Bogor pada masa kolonial, sehingga diharapkan dapat menambah wacana/ diskursus tentang perkembangan etnis Tionghoa di Kota Bogor. Hal ini tentu saja sangat dibutuhkan mengingat tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa yang selalu dihantam oleh isu-isu keretakan nilai-nilai nasionalisme, isu-isu konflik antar etnis, bahkan sampai fenomena politik identitas saat ini yang dilakukan oleh segelintir elite politik untuk mengais keuntungan dalam dimensi politik nasional dan lokal.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan metode historiografi dalam prosedur pelaksanaannya (*heuristic*, kritik, interpretasi dan penulisan), dalam proses analisisnya penelitian ini menggunakan pendekatan strukturasi milik Anthony Giddens. Pendekatan strukturasi ini berbeda dengan sejarah lainnya (narativis dan strukturalis), pendekatan ini menekankan fokus kepada kemampuan agen dalam menghadapi ketatnya struktur (baik struktur sosial, ekonomi dan politik). *Agency* sebagai tokoh utama dipilih karena memiliki kemampuan untuk menghadapi, beradaptasi bahkan mengubah jalannya (dinamika) struktur, berkebal sumber daya (modal) yang dimilikinya dalam dimensi (modal) sosial, (modal) ekonomi dan (modal) *cultural* (Giddens, 1984: 7). Pendekatan strukturalistik ini dinilai tepat untuk mampu mengungkap dan memahami objek penelitian ini, yang menekankan kepada kemampuan (*agency*) kelompok etnis Tionghoa Makassar dalam menghadapi kegiatan perniagaan beras di Makasaar masa kolonial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Etnis Tionghoa dan Restrukturisasi di Bogor Awal Abad ke-20***

Paruh pertama awal abad ke-20 merupakan periode yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bagi masyarakat Tionghoa di kota Bogor, hal ini dikarenakan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda mengeluarkan kebijakan desentralisasi (otonomi) daerah pada tahun 1905 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1905 No. 181). Kota Bogor menjadi satu wilayah yang dikenakan kebijakan tersebut dan berubah secara status menjadi Gemeente, sebuah kota mandiri yang dinilai mampu mengelola keuangan serta mampu memenuhi kebutuhan bagi para penduduknya. Pertumbuhan jumlah area industri perkebunan dan pembukaan (penyewaan) tanah-tanah partikelir di kota Bogor sejak akhir abad ke-19 (*Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, 1917: 419), menjadi satu sumber pemasukan yang cukup besar bagi pemerintah kota Bogor dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran kota. Perubahan dalam bidang ekonomi dan politik (pemerintahan) tersebut, membuat

masyarakat Tionghoa di kota Bogor harus mampu beradaptasi untuk dapat mempertahankan keberadaannya.

Pelaksanaan kebijakan pembentukan *Gemeente* Bogor sejatinya telah berlangsung sejak ditetapkan kebijakan otonomi daerah Hindia-Belanda di tahun 1905, akan tetapi penerapannya membutuhkan waktu yang cukup lama (*Gouvernement Besluit Tz.g.ag 15421/11925*). Permasalahan utama yang berkaitan dengan kota Bogor ialah tentang pengelolaan tanah yang berkaitan dengan kebutuhan industri dan warga kota, permasalahan ini sesungguhnya sudah berlangsung jauh sebelum kota Bogor ditetapkan menjadi *Gemeente*. Permasalahan tentang pengelolaan tanah ini memiliki hubungan erat dengan masyarakat etnis Tionghoa di kota Bogor, karena masyarakat etnis Tionghoa di Bogor umumnya menjadi pemilik dan penyewa dari tanah-tanah partikelir di kota Bogor.

Berdasarkan sumber masyarakat etnis Tionghoa tersebar di beberapa wilayah di kota Bogor, seperti di pusat kota (Kampung Pecinan), wilayah Leuwiliang, Tjiampea, Paroengpandjang, Tjibaroesa, Djonggol, Tjileungsi, Tjibinong dan Paroeng (*Memorie van Overgave Resident J.H.B. Kuneman, 1929: 8*). Keseluruhan wilayah-wilayah yang menjadi tempat bermukim masyarakat Tionghoa Bogor tersebut berstatus tanah partikelir, dan di dalam tanah partikelir tersebut terdapat masyarakat lokal yang tinggal dan bekerja menggarap tanah tersebut. Tanah partikelir yang ditempati dan diolah oleh masyarakat Tionghoa di Bogor merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah kolonial, melalui pembayaran pajak tanah partikelir dan pajak terhadap orang-orang yang bermukim di tanah yang berstatus tanah partikelir tersebut. Dalam laporan yang diberikan oleh Residen J.H.B. Kuneman kelompok masyarakat Tionghoa yang mendiami tanah-tanah partikelir di Bogor adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan yang tinggi dan taat dalam menjalankan tanggung jawab membayar pajak (*Memorie van Overgave Resident L.G.C.A. Hoek, 1931: 5*).

Tanah partikelir menjadi satu hal yang cukup penting bagi masyarakat Tionghoa, mengingat setelah pembentukan *Gemeente* Bogor hak istimewa etnis Tionghoa dalam mengelola pungutan pajak pasar, pajak opium, rumah judi, hingga rumah pemotongan hewan diambil oleh pemerintah kolonial (*Bosma dan Raben, 2008: 8*). Pengambil alihan sumber pemasukan bagi kelompok etnis Tionghoa di kota Bogor yang semakin berkurang tersebut, memberikan konsekuensi bagi masyarakat Tionghoa untuk semakin cerdas dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan ekonomi di kota Bogor pada periode awal abad ke-20. Kegiatan perniagaan di pusat kota (pasar), toko kelontong dan pengelolaan tanah partikelir adalah profesi dan sumber mata pencaharian utama masyarakat Tionghoa di kota Bogor pada periode awal pembentukan *Gemeente* Bogor (*Memorie van Overgave Resident J.H.B. Kuneman, 1929: 8*).

Isu-isu tentang status tanah partikelir dan status kepemilikan tanah partikelir menjadi fokus utama bagi pemerintah kota *Gemeente* Bogor, sehingga keberadaan tanah partikelir yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa di kota Bogor menjadi perhatian pemerintah *Gemeente* Bogor. Pemerintah *Gemeente* Bogor menghadapi persoalan yang cukup pelik mengenai kebutuhan pengadaan perumahan bagi penduduk kota Bogor, khususnya bagi masyarakat eropa yang bermukim di kota Bogor (*Memorie van Overgave Resident J.H.B. Kuneman, 1929: 8*). Persoalan lainnya adalah penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan *Gemeente* Bogor terhadap penduduk lokal yang hidup di atas tanah partikelir, beberapa penjelasan menyatakan bahwa kesejahteraan penduduk yang tinggal menumpang dan hidup di atas tanah-tanah partikelir mengalami penurunan. Wacana mengenai tingkat

kesejahteraan yang rendah dari penduduk yang tinggal (menumpang dan bekerja) di tanah partikelir, membuat pemerintah Gemeente Bogor dituntut untuk mengambil alih dan mencabut status tanah partikelir dari pemilik yang bermasalah dan tidak jelas kepemilikannya (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1912 No. 122). Hingga pada periode tahun 1920-an pemerintah Gemeente Bogor mulai melakukan perapihan dan penagmbil alihan tanah-tanah partikelir dari para pemilik hak sebelumnya, dengan cara membeli Kembali dan menggugurkan hakatas tanah partikelir melalui proses hukum (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1912 No. 177).

Salah satu tanah partikelir yang diambil alih oleh pemerintah Gemeente Bogor adalah wilayah Sukasari, wilayah ini berdekatan dengan kampung pecinan di pusat kota Bogor sehingga membuat cemas para penduduk Tionghoa Bogor yang bermukim di wilayah pusat kota (*Memorie van Overgave Resident J.H.B. Kuneman*, 1929: 5). Cukup banyaknya jumlah tanah partikelir yang diambil alih oleh pemerintah kolonial menjadi semacam ancaman bagi masyarakat etnis Tionghoa di Bogor, yang secara umum menempatkan keberadaan tanah partikelir sebagai alat produksi dalam kegiatan ekonomi mereka di Bogor. Disisi lain hak-hak istimewa mereka dalam penarikan pajak yang sebelumnya dikelola oleh mereka, mulai diambil alih pula oleh pemerintah kolonial. Situasi ini direspon oleh masyarakat Tionghoa dengan berbagai Langkah, yakni dengan menggunakan perwakilan mereka di *Gemeenteraad* untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka (etnis Tionghoa), membuka sekolah dan membuka perusahaan legal (sebagai upaya mengintegrasikan dengan ekonomi modern).

## ***Respon Terhadap Perubahan Ekonomi Politik di Awal Abad ke -20***

### **1. Pertarungan dalam Lembaga Gemeenteraad**

Isu-isu mengenai menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk lokal Bogor yang tinggal dan bekerja di lahan tanah-tanah partikelir, menjadi alasan bagi pemerintah kolonial untuk mengambil alih dan mencabut hak status tanah partikelir di kota Bogor. Isu-isu mengenai menurunnya kesejahteraan penduduk lokal di Bogor disinyalir hanya sebagai langkah untuk mengambil alih tanah-tanah partikelir untuk kepentingan ekonomi (pendapatan) dan kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah bagi warga Eropa yang cukup banyak datang dan bermukim di kota Bogor di awal abad ke-20. Pembukaan lahan perkebunan di tanah-tanah partikelir seperti Cianjur dan Megamendoeng membuat kebutuhan tempat tinggal bagi warga Eropa di Bogor semakin mendesak untuk dipenuhi. Isu-isu mengenai kepentingan pajak dan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan rumah tinggal bagi warga Eropa di Bogor, menjadi agenda utama yang dibicarakan dalam forum Gemeenteraad di Bogor.

Gemeenteraad Bogor sendiri baru dibentuk pada tahun 1922 dengan menempatkan pejabat dari Eropa sebagai pemimpin dewan kota tersebut, etnis Tionghoa memiliki perwakilan dalam Gemeenteraad sebanyak 2 orang dan juga turut mewakili golongan dari *Vreemde Oosterlingen* (*Binnenlands-Beetur*, 1915, No. 4406; Kan, 1938: 54). *Gemeenteraad* (Dewan Kota) menjadi wadah bagi kelompok masyarakat Tionghoa Bogor untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan yang terutama adalah kepentingan ekonomi mereka di Gemeente Bogor. Pemilihan perwakilan etnis Tionghoa untuk

kepengurusan Gemeenteraad dilaporkan cukup berliku, karena cukup banyak kelompok etnis Tionghoa yang memiliki kepentingan yang beragam. Seperti dilaporkan dalam *Memorie van Overgave* J.H. Kuneman pemilihan anggota *Gemeenteraad* berlangsung sangat kompetitif, dalam proses debat terbuka terjadi banyak kritik dan pandangan yang tajam dari masing-masing calon (*Memorie van Overgave Resident J.H.B. Kuneman*, 1929: 8).

*Gemeenteraad* menjadi arena (*field*) kontestasi dalam ruang publik kota Bogor pada masa kolonial, hal ini dikarenakan dihapuskannya fungsi *Chinnessch Bestuur* sebagai wadah aspirasi kelompok masyarakat Tionghoa. *Chinnessch Bestuur* tidak lagi menjadi perangkat untuk menyalurkan aspirasi kelompok masyarakat Tionghoa kota Bogor, akan tetapi hanya menjadi bagian dari pegawai pemerintahan kolonial di *Gemeente* Bogor (Husin, 2023: 203). Salah satu isu yang dibawa oleh perwakilan etnis Tionghoa kota Bogor dalam sidang-sidang *Gemeenteraad* adalah isu tentang kebijakan *passen stelsel*. Isu ini tidak hanya di dukung oleh kelompok etnis Tionghoa peranakan saja, akan tetapi juga mendapat dukungan dari kelompok etnis Tionghoa *totok* (Cator, 1935: 34). Kebijakan *passen stelsel* sendiri dinilai oleh masyarakat Tionghoa sebagai kebijakan yang membuang waktu dan finansial dalam proses pembuatannya, dan dinilai tidak adaptif dengan model sistem ekonomi Hindia-Belanda awal abad ke-20 (Husin, 2023: 160).

Berkaitan dengan kepentingan kelompok masyarakat Tionghoa Bogor terhadap tanah-tanah partikelir yang mereka miliki, perjuangan dalam *Gemeenteraad* membuahkan hasil. Perhatian pemerintah *Gemeente* Bogor terhadap alih fungsi dan status tanah partikelir di *Gemeente* Bogor tidak menyentuh tanah-tanah partikelir yang dimiliki/ dikuasai oleh etnis Tionghoa di Bogor. Berdasarkan sumber tanah-tanah partikelir yang diambil alih oleh pemerintah *Gemeente* Bogor adalah tanah-tanah yang berada di wilayah Djasinga, Tjikopo-Majak, Naggoeng, Tjiliwoeng, Megamendoeng dan Tjibodas. Tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki oleh para pengusaha yang berasal dari masyarakat eropa di Bogor, akan tetapi status kepemilikannya dinilai sudah tidak memiliki kejelasan (*Memorie van Overgave Resident J.H.B. Kuneman*, 1929: 8-9).

Memasuki akhir tahun 1930-an pertarungan para wakil *Gemeenteraad* Tionghoa Bogor mulai menghadapi pergesekan yang cukup keras, hal ini diakibatkan masuknya penetrasi kepentingan ekonomi dagang Jepang ke Hindia-Belanda (Goto, 1987: 19; Shiraishi, 1998: 4-7). Keberadaan ekonomi dagang Jepang dalam bentuk pedagang keliling dan dibukanya toko-toko kelontong milik orang-orang Jepang di Bogor mulai mengimbangi eksistensi lembaga perniagaan milik etnis Tionghoa Bogor (*Indische Verslag* 1931: 152; Twan Djie, 1995: 10)). Keluhan-keluhan warga Tionghoa Bogor terhadap kedatangan lembaga dagang Jepang di Bogor telah disampaikan oleh perwakilan mereka dalam sidang-sidang *Gemeenteraad*, akan tetapi para perwakilan ini tidak mampu untuk bertindak terlalu jauh karena mereka dipilih oleh pemerintahan *Gemeente* Bogor dan memiliki garis politik untuk membantu pemerintahan *Gemeente* Bogor untuk membangun kota Bogor (Suryadinata, 1984: 50-52).

## 2. Maksimalisasi Fungsi Sekolah Tionghoa

Sekolah menjadi pilihan dalam upaya mentransformasikan dunia modern kolonial bagi etnis Tionghoa di Bogor, karena upaya modernisasi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat kolonial di Hindia-Belanda mencapai puncaknya di awal abad ke-20. Dalam

lapangan ekonomi masyarakat kolonial di Bogor di awal abad ke-20, lembaga ekonomi milik setiap orang yang hendak menjalankan usaha harus terdaftar secara hukum dan diakui oleh pemerintah kolonial (Vleming, 1925: 64). Modernisasi lembaga ekonomi yang berlaku secara umum di Hindia-Belanda pada periode awal abad ke-20 ini, memberikan konsekuensi terhadap dua hal kepada etnis Tionghoa Bogor. Pertama, modernisasi lembaga ekonomi dalam bentuk pendirian firma (lembaga ekonomi berbadan hukum) semakin menegaskan bahwa model-model aktivitas ekonomi yang bersifat tradisional seperti menarik pajak, perdagangan opium dan sebagainya akan semakin ditinggalkan. Kedua, dengan munculnya firma-firma modern berbadan hukum milik etnis Tionghoa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengelola usaha firma-firma tersebut.

Kelompok masyarakat Tionghoa Bogor memiliki dua sekolah untuk anak-anak mereka, yang pertama adalah sekolah *Holland Chinesche School* (HCS) dan sekolah partikelir. Sekolah HCS adalah sekolah milik Tionghoa *totok*, dalam praktiknya menggunakan bahasa pengantar bahasa mandarin dan mengajarkan sejarah Tiongkok. Disisi lain sekolah partikelir bagi etnis Tionghoa peranakan menggunakan bahasa pengantar melayu, dan belajar mengenai sejarah Kerajaan Belanda. Berikut ini adalah data mengenai sekolah etnis Tionghoa di Bogor yang dirangkum melalui berbagai sumber:

*Onderwij voor Chineesch Gemeente Buitenzorg*  
1929-1933

Tahun	Holland Chinesch School	Sekolah Partikelir	Jumlah
1929	2	8	10
1931	2	6	8
1933	-	9	9

Sumber :

(*Memorie van Overgave Resident J.H.B. Kuneman, 1929: Bijlage XVI: 466*)

Berdasarkan data sekolah etnis Tionghoa Bogor mencaapi puncaknya pada tahun 1929, dengan mencapai 10 sekolah bagi etnis Tionghoa di Bogor, Sementara itu pada tahun 1931 mengalami penurunan menjadi 8 sekolah. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Hindia-Belanda pada tahun 1930, sehingga sekolah bagi etnis Tionghoa di wilayah tanah partikelir mengalami penutupan sekolah. Sementara itu pada tahun 1933 sekolah HCS dilaporkan tidak beroperasi kembali di *Gemeente* Bogor, sementara itu sekolah Tionghoa di tanah partikelir bertambah 1 menjadi 9 sekolah yang beroperasi ditahun 1933. Laporan terakhir di tahun 1933 dikabarkan bahwa jumlah murid Tionghoa di kota Bogor mencapai 519 orang dan memiliki 17 orang guru/ pengajar (*Memorie van Overgave Resident J.H.B. Kuneman, 1929: Bijlage XVI: 466*).

Pembukaan sekolah bagi anak-anak masyarakat tionghoa menjadi penanda perubahan orientasi ekonomi masyarakat Tionghoa hingga akhir pemerintahan Hindia-Belanda. Jenis-jenis pekerjaan tradisional sebagai buruh perkebunan dan industri tambang, pedagang keliling dan menetap yang selama ini menjadi trademark bagi masyarakat etnis Tionghoa mulai ditinggalkan. Meningkatkan ekonomi modern kolonial di Bogor yang ditandai dengan meningkatnya pula jumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di *Gemeente* Bogor, telah membuka peluang untuk jenis-jenis profesi baru seperti guru, dokter, teknisi dan karywan (juru tulis) di perusahaan-perusahaan (Schiff, 1992: 43-45). Jenis-jenis profesi

baru tersebut banyak diambil oleh Tionghoa peranakan Bogor, karena mereka lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan ekonomi dan politik di Hindia-Belanda. Melalui dunia pendidikan modern ini para anak-anak Tionghoa peranakan Bogor juga mendapatkan akses untuk berorganisasi dan memiliki jaringan politik ditingkat lokal (untuk mengenal dan berinteraksi dengan aktivis politik kelompok bumiputera).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Adaptasi etnis Tionghoa telah terbukti mampu menjaga eksistensi mereka di kota Bogor sejak era kolonial sampai saat ini. Sehingga wacana/ diskursus tentang perkembangan etnis Tionghoa di Kota Bogor tidak bisa dilepaskan dari perubahan dan perkembangan kota Bogor itu sendiri dari masa didirikan sampai dengan masa modern ini. Adaptasi dimaksud dijumpai dalam bentuk keterlibatan etnis Tionghoa dalam perekonomian kota sejak akhir abad ke-19. Perjalanan historis ini telah menempatkan sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan dan perkebunan serta industri sekaligus pemasaran barang-barang kebutuhan masyarakat. Gambaran adaptasi ini selanjutnya telah menjadikan eksistensi etnis Tionghoa kota Bogor sebagai bagian dari penggerak perubahan social yang tidak lagi dipandang sebagai makna simbolis, tapi sesungguhnya memiliki peran cukup penting di tengah penerimaan terbatas atas kehadiran mereka sejak dahulu.

## **REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA**

### **ANRI (Indonesia)**

Staatsblad van Nederlandsch-Indie Tahun 1905 No. 181

Staatsblad van Nederlandsch-Indie Tahun 1912, No. 122

Staatsblad van Nederlandsch-Indie Tahun 1912, No. 177

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie (selanjutnya ditulis ENI), Eerste Deel ('S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1917)

Gouvernemen Besluit Tzg.ag 15421/11925

Gouvernementsbesluit, 14 April 1925, No. 944

Binnenlands-Besstur 1915, No. 4406

### **NAN (Den Haag)**

Memorie van Overgave Resident Buitenzorg J.H.B. Kuneman 1929

Memorie van Overgave Resident Buitenzorg LGCA. Hoek 1931

Memorie van Overgave Resident Buitenzorg P.M. Letterie 1933,

Indische Verslag 1931

### **Buku**

De roo De Faille. (1971). Dari Zaman Kesultanan Palembang. Jakarta: Bhrata.

Husin, Huddy. (2023). Adaptasi Etnis Tionghoa Palembang Dalam Mempertahankan Eksistensi 1905-1949, Disertasi S-3. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Schijf, H. & B.A.M. (1992). The, Chinese Doctors in the Dutch East Indies: Social Mobility Among an Ethnic Trading Minority in A Colonial Society. Ithaca: CSAP Cornell UP.



- Shiraishi, Saya dan Takashi Shiraishi. (1998). *Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bosma, Ulbe dan Remco Raben, *Being Dutch in the Indies: A History Creolisation and Empire 1500-1920*. Ohio: Ohio University Press.
- Verslag van den Economischen Toestand der Inlandsche Bevolking, Deel 2. Batavia. 1924.
- Van der Zwaal, J. (1936). *Inlandsch Gemeentewezen in Zuid Sumatra en Javanen-transmigratie*. Wageningen: H. Veenman & Zonen.
- Vleming J.L. (1925). *Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch-Indie*. Batavia: Volkslectuur, 1925.
- Cator, W.J. (1935). *The Economic Position of the Chinese in the Nederlandsch Indies*. Oxford: Blackwell.

**Wawancara**

Bapak Guntur (Pengurus Klenteng Hok Tek Bio-Suryakencana Bogor) pada 15 November 2023.